

Dinamika Sosial-Ekonomi dan Budaya dalam Transmigrasi Penduduk Jawa Tengah ke Lampung masa Kolonial Belanda (1905 – 1941)

Andika Satria Yoga Suharno,¹ Sutiya,² Dadan Adi Kurniawan³

¹, Sebelas Maret University, Indonesia

², Sebelas Maret University, Indonesia

³, Sebelas Maret University, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 26, 2024

Revised August 29, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online December 30, 2024

Keywords:

Transmigration, Social Dynamics, Economic Dynamics, Cultural Dynamics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui alasan mendasar dilaksanakannya program transmigrasi di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. (2) Mengetahui proses transmigrasi pada masa penjajahan Hindia Belanda tahun 1905 – 1941. (3) Mengetahui dampak kebijakan program transmigrasi pemerintah Hindia Belanda tahun 1905 – 1941 terhadap bidang sosial budaya dan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan studi dokumen. Sumber dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program transmigrasi (kolonisatie) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program transmigrasi, surat kabar, dokumen pemerintah, dan artikel-artikel yang relevan. Studi kepustakaan menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal terkini dari sumber-sumber sekunder. Hasil penelitian memberikan informasi tentang alasan pemerintah Hindia Belanda melaksanakan program transmigrasi, karena adanya tuntutan politik etika di bidang emigrasi yang berlandaskan pada kepadatan penduduk. Pelaksanaan program transmigrasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama percobaan (1905 – 1911), tahap kedua sistem pinjaman (1912 – 1931), dan tahap ketiga sistem bawon (1932 – 1941).

ABSTRACT

This study aims to (1) Find out the basic reasons for the implementation of the transmigration program in Indonesia during the Dutch East Indies government. (2) Find out the transmigration process during the Dutch East Indies colonial period from 1905 – 1941. (3) Find out the impact of the transmigration policy of the Dutch East Indies government program from 1905 – 1941 on the socio-cultural and economic fields. This research is a historical research with document study. The sources in this study are documents related to the transmigration program (kolonisatie) during the Dutch East Indies government. Data collection was carried out by searching for document studies and library studies. Document studies search for data related to the implementation of the transmigration program, newspapers, government documents, and relevant articles. Library studies use the latest books and journals from secondary sources. The results of the study provide information on the reasons why the Dutch East Indies government carried out the transmigration program, because of the demands of ethical politics in the field of emigration, which was based on population density. The implementation of the transmigration program was divided into three stages, the first phase of the experiment (1905 - 1911), the second phase of the loan system (1912 - 1931), and the third phase of the bawon system (1932 - 1941).

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bermacam-macam jenis suku dan jumlah penduduk yang besar. Besarnya pertumbuhan penduduk dapat berpotensi menjadi ledakan dan masalah kependudukan yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sektor kehidupan. Penduduk memiliki arti sekumpulan manusia yang berada di suatu wilayah terikat oleh berbagai peraturan yang berlaku dan saling berinteraksi secara terus menerus (Ruslan, 2016: 1). Penyebaran penduduk yang tidak merata tentunya akan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah bersifat sentralistik, pertumbuhan penduduk yang sentralistik menunjukkan adanya penyebaran penduduk tidak tersebar secara rata. Padatnya penduduk Indonesia terhimpun di salah satu tempat khususnya di Pulau Jawa (Karimah, 2018: 305). Permasalahan kepadatan penduduk di Pulau Jawa membutuhkan sebuah program yang bisa menjadi solusi persebaran penduduk ke berbagai wilayah, maka pemerintah berupaya merancang sebuah program perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, maka dibuat program yang bernama transmigrasi.

Program transmigrasi sudah dilaksanakan sejak zaman kolonial di awal abad ke-20. Pelaksanaan program transmigrasi dibagi menjadi empat tahap pelaksanaan, yaitu pada tahun 1905 – 1911, 1912 – 1922, 1923 – 1931, dan 1932 – 1941 (Mac Andrews & Rahardjo, 1983: 92). Transmigrasi pada masa kolonial dikenal dengan kolonisatie, yaitu merupakan program perpindahan penduduk yang digunakan pada awal abad ke-20, secara umum disebut kolonisatieproof (Dahlan, 2014: 335). Istilah transmigrasi di Indonesia muncul ketika dikemukakan oleh Soekarno pada tahun 1927, dalam *Harian Soeloeh Indonesia*. Penyebutan transmigrasi berlangsung ketika Mohammad Hatta menyampaikan pentingnya program transmigrasi untuk pembangunan industri di luar Jawa, pada Konferensi Ekonomi di Kaliurang Yogyakarta, berbarengan dengan Rapat Panitia Siasat Ekonomi tanggal 3 Februari 1946 (Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 2015: 18) Program transmigrasi dijalankan sesuai dengan tuntutan politik etis bersama program irigasi dan pendidikan.

Politik etis menjadi faktor utama terlaksananya program transmigrasi. Keburukan kebijakan kolonial Belanda kepada kaum pribumi adalah sebab utama munculnya politik etis. Sikap amoral Hindia-Belanda mulai dikritisi oleh C. Th Van Denventer, kritik tersebut dituliskan dalam karyanya yang berjudul "A Debt of Honor". Van Denventer bersama kaum humanis meminta agar pemerintahan Hindia-Belanda bisa memberikan kesejahteraan terhadap daerah jajahannya (Setiawan, 2010: 3). Politik etis sering diberi makna sebagai politik balas budi. Secara tidak langsung Belanda harus bertanggungjawab atas berbagai kerugian yang dialami oleh orang-orang pribumi.

Mendesaknya kondisi pulau Jawa mengalami kepadatan penduduk pada awal abad ke-20, memutuskan pemberian upaya oleh pemerintahan Hindia Belanda dalam menangani jumlah penduduk. Proses penanganan diawali dengan adanya sensus kependudukan pada tahun 1905. Sensus penduduk memperoleh data kepadatan penduduk di pulau Jawa yang mengejutkan. Sekitar 30,1 juta orang yang berada di pulau Jawa hanya 7,5 juta yang berada di pulau-pulau lainnya (Palupi dkk., 2017: 42). Padatnya penduduk dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan di Jawa. Bahkan, dampak yang dialami sampai mempengaruhi perubahan ekonomi warga desa ditandai dengan dimulainya produksi komoditas ekspor seperti gula dan tembakau. Banyak lahan perkebunan yang beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan komersial.

Penyebab padatnya penduduk Jawa karena adanya konsentrasi pembangunan infrastruktur (sentralistik), baik dalam bidang pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan. Ahli geologi bernama Mohr, menjelaskan bahwa tanah di pulau Jawa subur dan iklim yang mendukung pada bidang pertani (Setiawan, 2010: 3). Oleh karena itu, penduduk di tanah Jawa terus bertambah sebab adanya daya tarik yang menguntungkan, sehingga banyak masyarakat tetap memutuskan untuk tinggal di Pulau Jawa. Kondisi itu, ditanggapi dengan segera oleh pemerintahan Hindia-Belanda dengan berinisiatif melakukan program transmigrasi.

Pulau Sumatera menjadi lokasi utama dalam pelaksanaan program transmigrasi, sebab pulau Sumatera dianggap sebagai pulau terluar yang paling mudah diakses. Proyek transmigrasi pertama menuju pulau Sumatera dikenal dengan istilah kolonisatie atau kolonisasi yang terjadi pada tahun 1905 (Fearnside, 1997: 1). Desa Gedong Tataan di Lampung menjadi tempat pertama kolonisasi petani Jawa (Lestari dkk.,

2015: 1). Transmigrasi diawali dengan dipindahkannya penduduk Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Provinsi Lampung. Penduduk Jawa yang dipindahkan untuk pertama kalinya sekitar 155 kepala keluarga (Wijiyanti, 2018: 1).

2. KAJIAN TEORI

2.1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris "policy" yang terbagi menjadi dari kata kebijaksanaan (wisdom) dan kebijakan (virtues). Menurut Thomas R. Dye dalam Syafii (2016: 350), kebijakan berarti segala apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keputusan pemerintah tidak mengambil tindakan tetap menjadi bagian dari kebijakan.

2.2. Kolonialisme

Kolonialisme adalah suatu bentuk dominasi-kontrol yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas sebuah wilayah. Kolonialisme dipandang sebagai bentuk eksploitasi dengan penekanan pada bidang perekonomian (Horvath, 1972: 46). Dominasi antar kelompok maupun intrakelompok dianggap sebagai bentuk kolonialisme, karena dapat mengacu perubahan budaya maupun perekonomian dalam masyarakat yang sebelumnya bersifat homogen.

Georges Balandier dalam (Arroyo, 2018: 60), kolonialisme adalah paham yang menekankan praktik eksploitasi dan wacana rasial di negara jajahan. Pembentukan situasi kolonialisme disusun dan diproduksi oleh kebijakan politik penjajah. Kolonialisme dapat berlangsung dalam waktu yang lama, apabila pengaruhnya sudah masuk ke dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Situasi perubahan yang diakibatkan kolonialisme bisa menjadi tempat munculnya konflik dan adanya negosiasi yang bertentangan.

Pemikiran Marxis tentang tujuan kolonialisme dapat dibedakan menjadi dua antara kolonialisme lama yang merupakan prakapitalis, kolonialisme modern dibangun bersama kapitalisme di Eropa Barat. Kolonialisme modern tidak hanya mencari harta benda, upeti, dan kekayaan dari negara yang ditaklukkannya, tetapi bertujuan mengubah struktur perekonomian negara jajahannya. Perubahan struktur ekonomi yang menginduk membuat arus manusia dan sumber daya alam antara negara-negara koloni dengan negara-negara kolonialnya (Loomba, 2003: 4). Arus ini bekerja dua arah menyediakan sumber daya manusia dengan perbudakan dan mengangkut sumber daya alam yang mentah untuk diolah menjadi bahan produksi industri.

2.3. Transmigrasi

Transmigrasi, secara etimologis berasal dari kata "migratio", yang artinya perpindahan penduduk. Pengertian transmigrasi sering disamakan dengan migrasi maupun emigrasi, sebab berasal dari sumber kata yang sama. Transmigrasi secara tegasnya adalah perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yaitu tinggal menetap dan mencari nafkah di tempat yang baru (Santoso, dkk, 2005: 11).

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam persoalan keberlangsungan suatu proses migrasi, yakni: 1) Masalah keberlangsungan hidup dalam menghadapi berbagai permasalahan serta upaya memperoleh pekerjaan di daerah tujuan; 2) Corak dan proses adaptasi diri dalam lingkungan sosial yang berbeda dengan keadaan sebelumnya; 3) Keterputusan hubungan sosio-kultural dan ekonomi dengan daerah asal dan kemungkinan meleburnya identitas kultural lama ke dalam ikatan budaya baru (Riskianingrum, dkk, 2014: 5 – 6)

2.4. Dinamika Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial adalah perubahan yang di dalamnya terdapat interaksi antara individu, komunitas atau organisasi yang berkaitan dengan struktur sosial atau pola norma dan nilai. Perubahan yang dikaji merupakan perubahan "sosial-budaya" (Goa, 2017: 54). Sztompka (2004: 05), menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang tidak dapat lepas dengan hubungan struktur dinamika di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dapat mengakibatkan unsur-unsur yang berada di masyarakat akan berubah.

Manusia merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk membedakan kategori makhluk hidup di bumi, yang mencakup tiga bidang dalam makhluk hidup secara biologi, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan (Santoso dkk, 2008: 7). Perbedaan manusia dengan hewan dan tumbuhan secara fundamental,

bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Penyebab manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan terletak pada akalnya, manusia mampu berpikir dan bisa menciptakan sebuah budaya.

Tylor dalam Harsojo (1967: 109), berpendapat bahwa kebudayaan adalah seluruh kompleks kehidupan, yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan, moral, kesenian, hukum adat-istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan aktivitas yang diperoleh dari anggota masyarakat. Berbagai perilaku manusia dapat menjadi budaya yang berkembang seiring berjalannya. Manusia menjadi pemeran dalam kehadiran budaya-budaya yang ada di sekitar.

Kebudayaan yang ada pada lingkungan setempat tentu bisa bertahan dan dapat berubah. Faktanya, terdapat berbagai proses yang berbeda dalam merubah apa yang budaya telah diwarisi kepada generasi berikutnya. Keadaan ini mencakup analogi budaya dari proses biologis standar seperti seleksi, mutasi, penyimpangan, serta variasi dalam proses transmisi yang spesifik terhadap fenomena budaya, seperti manusia yang cenderung mengadopsi budaya perilaku yang ada di lingkungan mereka (Shennan, 2000: 812).

2.5. Dinamika Perubahan Ekonomi

Sumber daya dalam perekonomian pembangunan akan bergeser dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor yang lebih produktif pada periode transformasi struktural. Perubahan struktur ekonomi berkaitan dengan negara-negara terbelakang yang ingin memperbaiki struktur tradisional berbasis pertanian menuju struktur lebih maju yang modern, mengarah pada urbanisasi dan dalam dimensi industri manufaktur dan sektor jasa (Mecik & Asfar, 2014: 231).

Struktur ekonomi adalah sistem ekonomi yang berjalan di dalam masyarakat, yang menggambarkan kondisi masyarakat dari perspektif penghasilan produksi. Struktur ekonomi pada dasarnya berjalan relatif seiring dengan kondisi ekonomi yang ada pada daerah tertentu. Perubahan ekonomi dapat direncanakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang jelas dan terstruktur (Aliakbar, 2019: 1).

3. METHOD

Tahap heristik merupakan tahap pertama dalam penulisan sejarah. Tahapan dalam sejarah tidak bisa dilangkahi begitu saja dalam proses penulisan. Seluruh penelitian sejarah memposisikan sumber sejarah adalah syarat utama yang tidak bisa dihilangkan (Hamid & Majid, 2011: 43). Tanpa sumber sejarah, peristiwa di masa lalu tidak akan bisa dilihat sampai masa sekarang. Berdasarkan sumber bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artifact (Kuntowijoyo, 2001: 96).

Sebelum melakukan proses pencarian, peneliti memahami berbagai bahan-bahan sumber sejarah yang bersifat arkeologis, epigrafi, atau numismatis, banyak sumber sejarah yang bertumpu pada museum. Apabila bahan sumber sejarah berupa dokumen resmi, peneliti berusaha mencari di dinas kearsipan. Jika bahan tersebut merupakan dokumen pribadi, peneliti memutuskan untuk mencarinya di tempat koleksi yang memiliki hubungan dengan peristiwa, peneliti perlu mencari tahu siapa pemilik dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah yang sesuai dengan tema (Notosusanto, 1975: 35).

Langkah dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Pencarian data yang dilakukan secara konvensional oleh peneliti, yaitu dengan cara mendatangi Monumen Pers bagian kearsipan, Museum Transmigrasi di Gedung Tataan dan Dinas Kearsipan Pringsewu. Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan pencarian sumber data dengan memanfaatkan sumber data koleksi digital. Pengumpulan sumber dicari melalui berbagai laman yang menyediakan data informasi digital seperti lama Google Scholar, Google Book, Library Genesis, Leiden University, Delpher, ANRI Digital Collection. Pencarian data secara konvensional yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi, Museum Transmigrasi di Gedung Tataan dan Dinas Kearsipan Pringsewu dan Metro.

Sumber sejarah yang berhasil ditemukan harus melewati langkah berikutnya, yaitu tahap pemilahan secara kritis. Tahap ini disebut dengan kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk mencari kebenaran (truth). Proses kritik sumber pertama ditujukan terhadap sumber pertama (primary sources), yaitu berhubungan dengan pengujian mengenai ketetapan (akurasi) dari sumber yang akan digunakan (Arif, 2011: 37 – 38).

Interpretasi merupakan tahap menafsirkan berbagai fakta (fact) yang diperoleh dari sumber data yang telah berhasil melewati tahapan kritik sumber. Tahap interpretasi dibutuhkan para peneliti karena sekumpulan bukti sejarah hanya berperan sebagai saksi bisu (witness) kenyataan di masa lalu. Fakta yang tidak diolah tidak bisa menggambarkan secara utuh peristiwa di masa lampau (Daliman, 2012: 81). Interpretasi dapat dikatakan sebagai tahap menggabungkan fakta-fakta yang telah terkumpul. Data yang tidak sesuai dengan kajian akan disingkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu peneliti dalam proses penggambaran ulang peristiwa sejarah (Hamid & Majid, 2011: 51).

Peneliti melakukan interpretasi sumber sejarah dengan melakukan proses analisis menggunakan teori kebijakan pemerintah, sosial, budaya, dan ekonomi yang digunakan dari berbagai temuan data sejarah. Berbagai arsip yang telah terkumpul dan berkaitan dengan tema penelitian dipilih yang valid serta dilakukan penafsiran menggunakan teori ilmu sosial agar mendapatkan hasil yang luas. Pendekatan ilmu sosial antropologi digunakan untuk menganalisis dinamika masyarakat yang terjadi ketika kebijakan transmigrasi dijalankan pada masa pemerintah Hindia-Belanda tahun 1905 – 1941.

Bagian terakhir dalam penulisan sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap penulisan atau pelaporan hasil akhir dalam penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 1999: 67). Penulisan sejarah menjadi perantara dalam menyampaikan hasil penelitian yang telah diungkap, diuji melalui tahap kritik dan interpretasi. Hasil akhir penelitian merupakan bentuk rekonstruksi sejarah di masa lampau (Daliman, 2012: 99).

Tahap penulisan penelitian ini berhubungan dengan kebijakan kolonial Belanda dalam pelaksanaan transmigrasi pada tahun 1905 – 1941. Ditambahkan kajian mengenai dinamika yang terjadi dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Fakta sejarah yang telah berhasil dikaitkan satu sama lain kemudian dibentuk menjadi tulisan skripsi yang berjudul *Dinamika Sosial-Ekonomi dan Budaya dalam Transmigrasi Penduduk Jawa Tengah ke Lampung masa Kolonial Belanda (1905 – 1941)*. Penyusunan historiografi berujuan untuk mengetahui sejarah awal terjadinya peprindahan penduduk Jawa ke Lampung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Pulau Jawa

Keadaan geografis kondisi tanah Jawa sebelum abad ke-20 sangatlah minim. Kegiatan penelitian klasifikasi tanah baru dimulai semenjak terbentuknya *Laboratoria voor Inlandschen en voor Bodemonderzoekingen* tahun 1905 (Sukariman, dkk, 2013: 100). Pembentukan *Bodemkundig Instituut Buitenzorg* (Bogor) menjadi titik awal dimulainya penelitian tanah pertama di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohr seorang ahli geologi awal abad 20, pulau Jawa dinilai memiliki tanah yang subur dan iklimnya mendukung pada bidang pertanian (Setiawan, 2010: 3). Pulau Jawa mempunyai kondisi iklim, tanah, dan lahan yang baik untuk pertanian. Semakin kaya tanah, maka semakin tinggi hasil pertanian. Banyaknya manfaat yang berasal dari kondisi geografis, menyebabkan penduduk di tanah Jawa terus bertambah di daerah Jawa.

Kondisi geografis di Jawa mendukung masyarakat untuk bercocok tanam dan memiliki iklim yang cocok dengan penduduk setempat. Keadaan geografis Jawa yang nyaman, membuat banyak masyarakat tidak ingin berpindah ke tempat lain. Keadaan ini menyebabkan penduduk terhimpun di satu tempat khususnya di Pulau Jawa (Karimah, 2018: 305). Pola peta kependudukan Jawa berada didekat tanah vulkanik muda yang letaknya di dasar erupsi gunung berapi. Beberapa kepadatan tertinggi ditemukan di lereng, di dasar gunung berapi, dan di cekungan sungai yang hulunya terletak di gunung berapi muda (Pelzer, 1946: 134).

Kepadatan penduduk Jawa terus bertambah, karena sistem pembangunan dan kehidupan yang terpusat. Peningkatan jumlah penduduk di Jawa meningkat pada tahun 1898. Penduduk Hindia Belanda mencapai angka 20an juta. Laju kepadatan penduduk yang terus bertambah menjadi permasalahan utama pemerintahan Hindia Belanda yang harus disegerakan penanganannya (Mundzir, dkk, 2021: 17). Ditambah terdapat arus imigrasi besar dari Bangsa Eropa menuju wilayah Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20, Pulau Jawa dibagi menjadi 21 keresidenan dengan kepadatan penduduk rata-rata 231 jiwa per kilometer persegi. Bahkan, Keresidenan Kedu dan Kesultanan Yogyakarta sudah sangat padat penduduk, yaitu 425 km persegi untuk Kedu dan 355 km persegi untuk Jogjakarta (Akbar, dkk, 2022: 3070).

Kepadatan penduduk di Jawa secara keseluruhan rata-rata 2.000 orang/km². Penduduk Jawa Tengah tahun 1905 terhitung mencapai angka 30 juta jiwa. Tahun 1920 terdapat 35 juta jiwa. Tahun 1930 telah melonjak kembali sampai 41,7 juta jiwa (Lombard, 1996: 54).

Kepadatan penduduk di Jawa pada awal abad ke-20, menimbulkan permasalahan sosial seperti penjarahan dan perampokan serta kejahatan lain yang meresahkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda (Akbar, dkk, 2022: 3070). Banyaknya kejahatan sosial maupun kriminalitas yang terjadi, dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan dan angka kepadatan penduduk di Jawa yang terus meningkat.

4.2. Kondisi Lampung

Secara global geomorfologi kawasan Lampung, memiliki luas 35.376.50 Km² meliputi zona-zona/sub kawasan-sub kawasan yaitu: zona/sub kawasan pesisir (coastal) yang berbatasan dengan Samudera Indonesia (di sebelah barat dan barat daya kawasan). Zona ini berhubungan dengan zona pegunungan Bukit Barisan yang merupakan sambungan dari arah Sumatera Barat. Zona pegunungan terhubung dengan zona hutan belantara; hujan (all types rainforest) yang berada pada dataran tinggi bersambungan melingkar yaitu ke arah Pakuan Ratu hingga daerah Mesuji, dan Manggala (Lampung Utara), kemudian berhubungan ke arah selatan (Lampung Tengah bagian timur), ke daerah Seputih Matara, mencakup area hutan suaka margasatwa Way Kambas, daerah Sukadana hingga merenggang ke arah Kalianda (Lampung Selatan) (Falah, 1995: 168).

Keadaan demografis Lampung pada awal abad ke-20 masih sangat sepi dibandingkan wilayah lainnya. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan survey penduduk pada tahun 1900-an. Hasil survey mencatat, kepadatan penduduk Lampung hanya 5 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk di Lampung pada awal abad 20-an berjumlah 156.618 jiwa. Terdiri dari 155.080 bumi putra, 146 orang Eropa, 486 orang China, 108 orang Arab dan Timur Asing (Depdikbud, 1977: 77) dalam (Budianto, 2020: 22). Survey yang didapat memperoleh hasil yang lebih kecil dibandingkan daerah lain, seperti Sumatera Barat; Pahiyang, Bengkulu; Madusari, Kalimantan Selatan; dan beberapa lokasi di Sulawesi. Rata-rata kepadatan di daerah tersebut mencapai 10 jiwa per kilometer.

Kondisi yang minim penduduk mendapatkan perhatian bagi para peneliti. Beberapa penelitian yang telah diterbitkan, banyak menggambarkan Lampung sebagai "empty Land" dikarenakan kondisi penduduk Lampung yang masih sedikit. Penggambaran kondisi Lampung sebelum perang dunia kedua banyak ditulis oleh pemerintah kolonial Belanda. Misalnya ditulis oleh Dr. R. Breorma dengan judul *De Lampongsche Disticten* (1916), Dr. J. W. Van Royen yang menulis *Nota Over de Lampongsche Merga's*, Hissink menulis *Het Pepadonwezen*, Mr. H. Guyt menulis *Hoodlijnen van Het huwelijks rect in de Lampongs* (1937). Penggunaan istilah "the empty land" sering dipakai dalam penelitian-penelitian abad 20-an (Budianto, 2020: 22).

4.3. Latar Belakang Pelaksanaan Transmigrasi Masa Kolonial

Transmigrasi pertama di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya program percobaan perpindahan penduduk (kolonisatie) oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Kebijakan transmigrasi penduduk Jawa ke luar Jawa pertama kali, dilatarbelakangi oleh pelaksanaan salah satu tuntutan politik etis, yaitu emigrasi untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Adanya tuntutan perbaikan pada bidang emigrasi disebabkan kondisi tanah di pulau Jawa yang sempit dan cepatnya pertambahan penduduk di Jawa (Setiawan, 2010:).

Pertumbuhan penduduk Jawa yang cepat dimulai pada abad ke-19. Kepadatan penduduk membuktikan adanya ketidakmerataan yang cukup besar dalam distribusi kependudukan (Pelzer, 1946: 134). Suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar yang mencakup sekitar 40% penduduk nusantara, mayoritas penduduk nusantara tinggal di pulau Jawa. Mengingat menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa, dan persepsi adanya ketimpangan distribusi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain; pemerintah kolonial Belanda berencana mengirim orang Jawa ke pulau lain. Percobaan pertama, dilakukan di Lampung pada tahun 1905 (Tirtosudarmo, 2015: 162).

Kepadatan penduduk yang berlebihan berdampak pada kehidupan masyarakat di Jawa, seperti di bidang sosial dan ekonomi. Pertama, adanya permasalahan sosial seperti penjarahan dan perampokan serta kejahatan lain yang meresahkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda (Akbar, dkk, 2022: 3070). Kedua,

kekurangan subsidi pangan dikhawatirkan membawa bencana kelaparan. Disebabkan, karena tidak adanya keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan kondisi lahan yang dapat dikerjakan (Nakhwori, 2020: 10).

Gagasan politik etis mulai dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Politik etis secara resmi ditetapkan langsung oleh ratu Wilhelmina dalam pidato tahunan yang diadakan bulan September 1901. Belanda memberikan komitmen untuk mendorong kemakmuran bangsa Hindia Belanda dengan penuh tanggungjawab. Pemberian politik balas budi dilakukan tidak dengan ikhlas. Petinggi Belanda berbuat demikian hanya untuk menghindarkan diri dari kritik yang selalu dilontarkan penduduknya dan dikhawatirkan terdapat perlawanan yang semakin luas (Isbandiyah & Susilo, 2018: 407).

Kebijakan politik etis yang telah ditetapkan oleh Ratu Wilhemina berfokus pada bidang imigrasi, irigasi dan edukasi. Ketiga ranah pembangunan politik etis disebut trilogi atau trias politik. Bidang irigasi Belanda melakukan pembangunan untuk mengairi perkebunan di tanah Hindia Belanda. Selain itu, emigrasi fokus dalam melakukan upaya pemindahan penduduk, khususnya di Jawa. Sedangkan edukasi mengembangkan pada aspek pendidikan, mendidik kalangan priyayi sampai mereka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda (Kurniawan, dkk, 2022: 42).

Melihat keadaan pulau Jawa yang mendesak, membuat bidang emigrasi pada politik etis sangat diprioritaskan. Kebijakan pemindahan penduduk pada pemerintahan Hindia Belanda dianggap sebagai manifestasi dari kebijakan politik etis. Adanya perpindahan penduduk bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan lahan pertanian di pedesaan Jawa dan kemiskinan (Padmo, 1999: 61). Prioritas kebijakan politik etis terdapat pada perpindahan penduduk, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

4.4. Proses Transmigrasi Masa Kolonial Belanda Tahun 1905 – 1941

4.4.1. Periode Pertama: Sistem Percobaan (1905 – 1911)

Pemerintah Hindia Belanda telah menyusun alasan pelaksanaan yang kuat sebelum pelaksanaan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi didasari oleh, tuntutan politik etis, kepadatan penduduk, dan pemilihan wilayah lokasi wilayah transmigran. Usai mempertimbangkan berbagai usulan maupun saran pejabat pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah segera melakukan percobaan transmigrasi pada tahun 1905. Keresidenan Kedu terutama Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan Karanganyar dipilih sebagai daerah yang sebagian penduduknya akan dipindahkan ke Lampung pertama kali (Amir & Rahman, 2020: 14).

Sementara lokasi Gedong Tataan di Provinsi Lampung menjadi pusat tujuan utama perpindahan penduduk Jawa ke Sumatera. Alasannya, karena populasi penduduk di wilayah Gedong Tataan masih cenderung sedikit. Program perpindahan penduduk secara resmi akan dimulai pada tahun 1905. Program transmigrasi fase percobaan mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintahan Hindia Belanda (Ensiklopedi van Nederlansch Indie, Tweede Druk H – M, s' Gravenhage, halaman 509 – 522).

Penyusunan rencana diawali dengan perbedaan paham yang terdapat antara pemimpin transmigrasi pertama Heyting dengan penggantinya van Dissel, hanya mengenai seleksi dari calon-calon transmigran. Heyting berpendapat agar para calon-calon transmigran merupakan petani-petani yang sehat dan kuat untuk membangun sebuah desa pertanian, sedangkan van Dissel menghendaki siapa saja dapat menjadi transmigran petani yang baik, asalkan diberi pendidikan dan dipimpin ke arah agraris (Hardjono, 1982: 10).

Pemilihan calon transmigran dipilih langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Pelaksanaan program transmigrasi pertama dipilih 155 kepala keluarga yang berasal dari Kedu. Transmigran dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan di Gedong Tataan, Afdeling Teluk Betung (Way Lima) Lampung Selatan pada awal 1905. Tempat transmigran pertama diberi nama Desa Bagelen karena kebanyakan para transmigran berasal dari Kabupaten Bagelen di Keresidenan Kedu di Pulau Jawa. Ongkos perjalanan para transmigran ke Gedong Tataan ditanggung oleh pemerintah (Amir & Rahman, 2020: 17).

Periode pertama, para transmigran diberikan premi 20 guldens, setiap kepala keluarganya, dilengkapi pemberian alat-alat pertanian, alat-alat dapur seperti panci, wajan dan lainnya. Penduduk Jawa yang telah sampai di kawasan Gedong Tataan, diberikan tempat tinggal dan mendapatkan cadangan makanan selama dua tahun. Dijelaskan di dalam Anggaran Pemerintah, biaya setiap kepala keluarga

mendapatkan jatah 300 guldens, tetapi tidak termasuk biaya pembangunan jalan dan irigasi (Heeren, 1979: 11).

Percobaan transmigrasi selama ini ada berhasil baik. Maka percobaan-percobaan ini boleh dianggap selesai, namun perlu adanya perubahan dalam cara memberi bantuan kepada transmigran, supaya belanja negara dapat dihematkan. Kecuali uang keperluan di Jawa bagi calon-calon transmigran (untuk membayar hutang dan sebagainya) dan ongkos perjalanan ke tanah tujuan, biaya lain-lain menjadi pinjaman bagi transmigran dan harus dibayar kembali". Demikian pendapat De Graff dalam laporannya (Sjamsu, 1960: 22).

Berdasarkan laporan De Graaff, maka masa percobaan transmigrasi sejak tahun 1905, tetap dinilai berhasil. Hanya saja, penyelenggaraan pertama pelaksanaan transmigrasi dinilai sangat mahal, biaya yang digunakan satu keluarga rata-rata mencapai 750 guldens. Laporan De Graaff dalam Direktur Binnenlandsch mengemukakan pendapat, agar pemerintah bisa mengadakan perubahan terkait pembiayaan program transmigrasi (Sjamsu, 1960: 23).

4.4.2. Periode Kedua: Sistem Simpan Pinjam (1912 – 1931)

Pelaksanaan transmigrasi masa percobaan tahun 1905 – 1911 mendapatkan kritik oleh Direktur Hindia Belanda. Pasca pelaksanaan program transmigrasi pertama Direktur B. B De Graaf memberikan hasil laporan peninjauan ke tanah transmigrasi pada tahun 1910. Direktur B. B De Graaf berpendapat, jika pelaksanaan transmigrasi pertama dinilai sangat mahal. De Graaf mengusulkan adanya perubahan sistem pembiayaan agar dana yang digunakan tidak berlebih, maka terjadilah perubahan cara penyelenggaraan transmigrasi (Sjamsu, 1960: 23). Pemberian bantuan pada periode kedua tidak diberikan secara gratis seperti sebelumnya. Pada fase kedua, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan transmigran menggunakan sistem simpan pinjam.

Selama proses transmigrasi, Bank Kredit Lampung berhasil didirikan oleh pemerintah di Teluk Betung pada Maret tahun 1911. Transmigran dan pemerintah menyebutnya Bank Rakyat Lampung (Lamongsche Volksbank). Bank Rakyat Lampung didirikan untuk membantu pemerintah Belanda memberikan premi kepada transmigrasi (Sjamsu, 1960: 23).

Bank Kredit Lampung memiliki wewenang dan tugas menyediakan dana sekitar 22,5 gulden kepada setiap transmigran. Bank Kredit berhak memberikan peminjaman dalam bentuk kredit dengan nominal maksimal 300 gulden dengan bunga 9%. Para migran dapat meminjam uang tambahan untuk pembelian misalnya peternakan, peralatan pertanian atau bahan bangunan (Heeren, 1979: 11).

Semenjak Bank Kredit Lampung berdiri tahun 1912. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Kredit Lampung untuk melanjutkan program transmigrasi ke Lampung. Melalui Belsuit Pemerintah tanggal 16 Agustus 1913 no 19, bank dapat mendanai 60.000 gulden untuk membantu kebutuhan para migran dengan bunga 4% per tahun. Akibat perubahan tersebut, para transmigran hanya menerima biaya hidup sebesar 22,5 gulden per keluarga sesuai dengan peraturan. Keperluan membangun rumah, membeli alat-alat pertanian dan lain-lain, transmigran hanya dibatasi meminjam uang ke bank sebesar 200 gulden dan dibayar melalui cicilan selama 10 tahun. Biasanya transmigran hanya meminjam uang tidak lebih dari 10 gulden (Sudarno, 2018: 8).

Pada tahun 1930-an program transmigrasi mengalami perubahan secara administrasi, yaitu syarat para transmigran. Pemerintah Hindia-Belanda menaikkan syarat agar program transmigrasi dapat berjalan lebih baik. Pertama, calon transmigran harus memiliki kemampuan dalam bercocok tanam. Kedua, kondisi fisik harus normal dan kuat, agar mampu bekerja keras di tempat perpindahan. Ketiga, memiliki usia muda. Keempat, sudah berkeluarga dan menjamin agar tertib di tempat tinggal barunya. Kelima, tidak memiliki banyak anak kecil, agar tidak mengganggu atau menjadi beban di lokasi transmigrasi. Keenam, tidak pernah menjadi kuli kontrak pekerja Hindia-Belanda, karena ketidakpuasan berawal dari mereka dan dikhawatirkan akan menjadi seorang demonstran di kelompok. Ketujuh, waspada terhadap pernikahan kolonialisasi. Kedelapan, jika wanita tidak sedang mengandung, agar bisa bekerja di tempat barunya. Kesembilan, pemuda yang belum menikah diharapkan menikah di tanah Jawa, supaya tidak menikah di lokasi transmigrasi. Kesepuluh, berbagai peraturan tidak berlaku, jika satu desa ikut menjadi calon transmigran (Heeren, 1979: 13 – 14).

Transmigrasi pada periode ini mendapatkan tantangan baru dari kepentingan perkebunan, khususnya dari lembaga yang bertanggung jawab dalam perekrutan buruh kontrak dari pulau Jawa

(Tirtosudarmo, 1990: 59). Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di luar pulau Jawa dihadapkan pada kondisi dimana perkebunan besar membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Perpindahan penduduk menjadi opsi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan (Asri, 2022: 124 – 125).

Perusahaan perkebunan mengalami banyak kesulitan dalam merekrut tenaga kerja, khususnya di daerah Sumatera Timur pada tahun 1930. Kejadian tersebut dapat terjadi karena adanya penghapusan sanksi pidana oleh pemerintah. Dihapuskannya sanksi pidana, menyebabkan banyak tenaga kerja Jawa yang tidak puas dengan pekerjaannya di perkebunan. Para pemilik perkebunan berharap program transmigrasi dapat terus berhasil, karena kehadiran transmigran dipandang sebagai sumber tenaga kerja yang penting (Tirtosudarmo, 1990: 60).

Pemerintah Hindia Belanda tidak bisa membantu secara cepat kebutuhan tenaga kerja untuk keperluan perusahaan, tetapi sampai tahun 1931, tambahan penduduk di Lampung terus bertambah karena kelahiran dan kedatangan transmigran sukarela dengan kemauan dan biaya sendiri. Transmigran yang datang kebanyakan terdiri dari keluarga atau orang-orang satu desa dari transmigran lama. Kehidupan transmigran baru dibantu oleh transmigran lama (Sjamsu, 1960: 38).

Akhir jumlah transmigran di Gedong Tataan mencapai 29.863 jiwa. Jumlah yang terhitung sudah termasuk 3.500 jiwa transmigran-sukarela yang datang sejak tahun 1927 sampai tahun 1931 (Sjamsu, 1960: 38).

4.4.3. *Periode Ketiga: Sistem Bawon (1932 – 1941)*

Pejabat pemerintah mencatat sebelum tahun 1932, beberapa ribu orang Jawa bermigrasi ke Lampung atas inisiatif mereka sendiri dan biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan biaya pada awal pelaksanaan sistem bawon sebesar 48.000 guldens (di antaranya 26.000 guldens untuk ongkos kereta api). Awalnya para transmigran ditempatkan di Gedong Tataan pada keluarga transmigran lama. Sistem bagi hasil upah (Sjamsu, 1960: 39).

Setibanya di sana, mereka akan memanen padi dan mendapatkan bagiannya berdasarkan sistem bawon yang berlaku di Jawa. Bagian beras bawon dan peluang kerja berupah yang tersedia memungkinkan para pendatang baru dapat hidup, sampai tanaman pertama mereka dapat dipanen dari ladang yang baru dibuka. Para transmigran mendapatkan 5 pikol beras dari hasil panen, hasil panen yang diterima dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tiga hingga empat bulan sebelum panen. Keuntungan yang didapat oleh pemerintah dengan sistem ini adalah hampir keseluruhan biaya ditanggung oleh pemukim sendiri (Kingston, 1990: 488).

Baru dalam tahun 1932 program transmigrasi resmi dimulai kembali. Desakan pelaksanaan transmigrasi pemerintah berhubungan dengan dihapusnya Koelie Ordonnantie. Kondisi Gedong Tataan telah penuh membuat pemerintah memutuskan untuk membuka desa baru di sebelah utara Tandjung Karang. Desa ini berada di dalam Sukadana dan diberi nama Gedong Dalam. Terdapat 7.000 jiwa transmigran yang berhasil dipindahkan pada tahun pertama pelaksanaan (Sjamsu, 1960: 7).

Tahun-tahun pertama pelaksanaan program transmigrasi pada tahun 1932, pengeluaran untuk transmigrasi terhitung rendah, karena para transmigran baru dikelompokkan di sekitar daerah-daerah yang sudah dibangun sebelumnya (Hardjono, 1982: 6). Para transmigran yang baru datang diminta untuk tinggal bersama masyarakat transmigran yang lebih dulu datang.

Ongkos transmigran sebelumnya ditanggung oleh pemerintah pada tahun 1932 – 1934. Pemerintah menetapkan kebijakan baru pada tahun 1935, peraturannya menegaskan agar para transmigran membayar kembali semua biaya yang diberikan kepada mereka. Semenjak ditetapkannya aturan, para transmigran membayar kembali 12,50 gulden setiap kepala keluarga untuk biaya pemindahan, utang-utang alat pertanian, alat dapur dan obat-obatan. Tidak ada pemberian yang benar-benar gratis dari Belanda (Sjamsu, 1960: 8).

Adanya kehendak untuk mengikuti program transmigrasi karena diperkuat dengan bermacam-macam, misalnya karena penerangan dari pemerintah yang berkaitan dengan transmigrasi, pendidikan, surat-surat keluarga dan kawannya yang telah lama tinggal disana. Terdapat sebab lain yang memaksa orang untuk meninggalkan kampung halaman dalam keadaan terpaksa, yaitu karena adanya bahaya alam dan

gangguan keamanan yang nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan transmigrasi (Hardjosudarmo, 1965: 149 – 150).

Pemerintah memulai kebijakan transmigrasi dengan sistem Bawon awalnya hanya untuk memanen padi. Sistem Bawon, mengharuskan pemerintah menyediakan lahan bagi para transmigran. Mereka harus membayar ongkos sendiri dalam waktu dua atau tiga tahun setelah pelunasan. Pemerintah biasanya memindahkan mereka ke Lampung dari Jawa pada musim panen, sekitar bulan Februari-Maret. Pemilihan waktu tertentu bertujuan supaya mereka bisa langsung dijadikan pekerja oleh pendaatang sebelumnya. Gaji mereka dibayar dalam bentuk natura, berupa beras. Pembagian hasil panen di Jawa biasanya hanya sepersepuluh; di Lampung, mereka dapat mendapatkan sepertujuh atau seperlima hasil panen. Dari penghasilan beras itulah mereka membayar utangnya dan memulai hidup baru di Lampung (Tirtosudarmo, 1990: 60 – 61).

Keadaan di daerah transmigrasi di Lampung semakin membaik. Banyak transmigran-sukarela yang datang berpindah ke sana. Jumlah transmigran yang dipindahkan oleh pemerintah dari Jawa semakin bertambah besar. Pada awal 1940 daerah ini sudah berpenduduk 47.000 jiwa (Swasono & Singarimbun, 1985: 12). Perhitungan terakhir sekitar 1941 sudah terdapat 173.959 jiwa transmigran di seluruh daerah Lampung (Sjamsu, 1960: 8).

4.5. Dampak Transmigrasi

4.5.1. Bidang Sosial

Para transmigran dari Jawa secara bertahap sudah mulai datang pada awal abad ke-20. Daerah Lampung bersedia menampung kaum pendaatang dari Jawa, bahkan dari daerah Sumatera lainnya. Proses perpindahan penduduk yang terus berdatangan mendiami daerah "Sang Bumi Rua Jurai" hidup berdampingan dengan rukun penuh toleransi (Suwando, 1981: 132).

Keterbukaan masyarakat Adat Lampung dipengaruhi oleh falsafah hidup yang mereka pegang, yaitu Pi'il Pesenggiri. Falsafah yang dapat dimaknai sebagai harga diri berisi diantaranya" (1) Pesenggiri, berarti pantang menyerah dan pantang mundur, (2) Juluk beadek, mengandung arti suka dengan gelar dan nama kehormatan, (3) Nemui Nyimah, mengandung arti suka memberi dan menerima dalam suasana suka maupun duka. (4) Nengah Nyappur, bermakna suka membaaur dan bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, dan (5) Sakai Sambayan, yang mengandung arti suka bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga (Fachrudin, 1996), dalam (Budianto, 2020: 21).

Sifat terbuka yang dimiliki oleh orang Lampung, dapat dilihat sikap ketika orang luar datang ke daerahnya. Mereka akan menyambut baik semua orang. Sudah menjadi kebiasaan orang Lampung terbuka dengan dunia luar, sehingga tidak jarang mengundang para pendaatang untuk berada di lingkungannya (Suwando, 1981: 80).

Tahun-tahun awal, kehidupan stratifikasi sosial terlihat berjalan dengan sederhana. Desa Bagelen Lampung telah dipimpin oleh bapak Poerwo karena beliau merupakan transmigran dari Kedu, Jawa Tengah yang dipilih berdasarkan hubungan kedekatan antara wong pagede (orang terpandang yang memiliki jabatan atau bangsawan) dan wong cilik (rakyat biasa). Beliau dipercaya menjadi kepala desa selama 2 tahun dari 1905 sampai tahun 1907 (Yuliyani, dkk, 2022: 7). Sistem tunjuk pemilihan kepala desa akan berlangsung selama masa transmigrasi.

Bapak Poerwo yang telah selesai masa jabatannya maka digantikan oleh bapak Karterejo, yang merupakan penduduk transmigran dari Kedu Jawa Tengah. Pada Karterejo menjadi kepala desa sampai tahun 1912. Pada masa pak Karterejo sudah mulai dibangun sekolah desa melalui menteri kewadenan, sekolah desa berhasil didirikan pada tahun 1910. Sekolah tersebut khusus untuk anak-anak kolonis belajar dan memperoleh pengetahuan melalui menteri kewadenan dengan ilmu bercocok tanam (Yuliani, dkk, 2022: 7).

Terjadinya gesekan konflik disebabkan karena kepadatan penduduk Jawa lebih mendominasi dibandingkan Lampung. Penduduk suku Jawa membentuk komunitas yang terpisah dan mengembangkan kebudayaan daerahnya di daerah transmigrasi. Pemisahan antara pemukiman penduduk asli Lampung dan penduduk Jawa dinilai membentuk masyarakat yang membeda-bedakan satu sama lain dan dianggap tidak

sesuai dengan tujuan transmigrasi (Asri, 2022: 133). Ketegangan sosial terjadi pada masa percobaan yang disebabkan adanya permasalahan tanah.

Dijelaskan lebih detail permasalahan sosial yang terjadi oleh Schalkwijk dalam Sudarno (2018: 8), pegawai pengadilan di Gedong Tataan pada 1910 pernah menangani perselisihan karena persoalan perbatasan wilayah, namun bisa didamaikan karena kedua komunitas (penduduk asli dan pendatang) memilih berdamai dan bergotong royong dalam menghadapi permasalahan. Penduduk asli tetap membutuhkan kehadiran transmigran, karena membantu penanaman padi atau tegalan. Sebaliknya, para pendatang yang tidak mau mengolah lahan mentah pemerintah, memutuskan untuk menggarap lahan penduduk asli sebagai pekerja upah, seperti mencangkul, menumbuk padi dan memetik lada.

Proses kedekatan sosial masyarakat Lampung dan Jawa kembali dimulai ketika masyarakat Etnis Lampung tetap memperkerjakan etnis Jawa. Interaksi terjadi secara mendalam, tidak hanya sebatas hubungan tuan tanah dan pekerja. Hubungan tersebut berkembang menjadi kehidupan sosial kedua etnis. Hubungan yang sebelumnya hanya tentang menggarap tanah etnis Lampung saja, namun sudah merambah ke ranah sosial dan budaya. Adanya keberhasilan dalam proses interaksi, terjadilah akulturasi budaya kedua etnis tersebut, sehingga dalam perkembangan hubungan pekerjaan menjadi rekan kerja yang saling membutuhkan (Juniadi, dkk, 2021: 138).

4.5.2. Bidang Budaya

Permulaan abad ke-20 penduduk Jawa sudah mulai mendiami daerah yang dikenal sebagai daerah transmigrasi, tetapi suatu sikap persamaan belum terlihat muncul diantar kedua kelompok Lampung dan Jawa. Sangat sulit untuk melihat pengaruh kebudayaan pada masa awal perpindahan penduduk. Keduanya sama-sama terisolasi untuk tidak saling memberikan pengaruh. Masyarakat Jawa berkelompok pada satu wilayah tertentu dan belum ada campuran yang memungkinkan asimilasi total. Ditambah adanya anggapan ketidaksamaan yang ditontonkan oleh Belanda, jika ada kesenjangan antara penduduk Jawa yang dianggap sebagai transmigrasi atau kuli kontrak (Suwando, 1981: 150).

Kedatangan para transmigran Jawa ke Lampung memperkaya keberagaman seni daerah. Para transmigran Jawa yang sebelumnya memiliki kesenian khas Jawa sering menggunakannya sebagai pertunjukkan kebudayaan mereka kepada masyarakat sekitar. Kesenian terus berkembang di masyarakat transmigrasi desa Bagelen Kec. Gedong Tataan Lampung. Kecintaan akan budaya lama menyebabkan masyarakat transmigran menyebabkan budaya Jawa tetap dilestarikan di Lampung (Yuliani, dkk, 2022: 8).

Para transmigran yang datang ke Gedong Tataan Lampung, bertemu langsung dengan penduduk asli Lampung. Penduduk asli menggunakan bahasa aslinya, bahasa Lampung. Sementara transmigran yang berdatangan menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa. Adanya perbedaan kedua budaya para penduduk yang ada di Lampung, masyarakat memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, penduduk asli dan penduduk transmigran mulai bertukar bahasa dan memahami bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari (Yuliani, dkk, 2022: 8).

Bahasa menjadi salah satu produk untuk menunjukkan ekspresi sosial, dalam kehidupan masyarakat. Bahwa dari bahasa mampu membentuk pola pikir yang membuat adanya sebuah kebudayaan di masyarakat. Bahasa menjadi unsur yang penting dalam menggali kesadaran dalam sebuah kebudayaan. Bahasa dianggap sebagai sistem kebudayaan tanda sentral. Dengan adanya bahasa manusia dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melihat tanda sebuah kebudayaan yang ada di masyarakat (Lafamane F, 2020). Penggunaan nama daerah (toponimi) tentu sangat berhubungan dengan proses masuknya budaya Jawa ke Lampung.

5. Bidang Ekonomi

Pelaksanaan program transmigrasi pada masa Hindia-Belanda memberikan dampak perekonomian yang berbeda-beda, mulai dari perluasan sektor industri perkebunan, pembangunan jalur transportasi, dibangunnya persawahan, dan pembangunan irigasi pada sektor agraria. Kedatangan transmigran Jawa menjadi kunci percepatan terhadap pembangunan perekonomian yang ada di Lampung.

Pertama, perluasan sektor industri. Wilayah Lampung menjadi tempat yang dirancang untuk kepentingan sektor industri. Perluasan sektor industri perkebunan diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Penduduk dari wilayah Banten dan Sumatera Selatan sudah mulai bekerja di perkebunan Lampung pada awal abad ke-20. Para penduduk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur selanjutnya ikut bekerja di perkebunan seiring dengan berjalannya transmigrasi yang dimulai sejak tahun 1905. Para penduduk dari pulau Jawa dapat mendukung perluasan perkebunan, karena memiliki pengalaman dalam bidang perkebunan, khususnya kopi (Ariwibowo, dkk, 2023: 51).

Nasib penduduk asli dan transmigran yang tinggal di Lampung memiliki keadaan yang berbeda. Kelompok orang Lampung lebih banyak bekerja di perkebunan lada, kopi, dan berladang secara berpindah-pindah (nomaden). Keadaan ini masih dapat dilakukan karena tanah yang masih luas. Kelompok orang Kebang yang berdatangan dari Utara juga berpindah-pindah, tetapi lama-kelamaan mereka mengusahakan tempat untuk menetap di wilayah tertentu. Kelompok orang Jawa merupakan "transmigrasi" dan kuli kontrak di perkebunan Belanda. Nasib mereka sangat menderita, terutama kuli kontrak yang menandatangani *Poenale sanctie*. Manusia hanya dianggap sebagai hewan tanpa imbalan yang layak. Hanya diberikan uang seenggol sehari. Martabat mereka sangat rendah di mata Belanda, sedangkan nasib transmigrasi lebih baik, karena mereka memiliki sedikit kebebasan (Suwando, 1981: 132).

Kedua, pembangunan jalur transportasi. Pembangunan sarana transportasi merupakan sarana penting untuk mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan bagi wilayah Lampung, dan wilayah Sumatera Selatan sejak dekade kedua abad- ke-20. Pembangunan sarana transportasi meningkatkan percepatan pengambilan sumber daya ekonomi dan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah kolonial untuk meningkatkan lalu lintas jaringan perdagangan (Ariwibowo, dkk, 2023: 51).

Sebelum kedatangan transmigran Jawa akses transportasi jalur darat masih sangat minim. Kondisi lalu lintas darat yang masih primitif menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan pembangunan yang intensif. Selain membuka akses jalan transportasi, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan pembangunan jaringan kereta api. Sebuah ide mulai dibicarakan sejak tahun 1895 yang memicu berbagai perdebatan (Kristian, 2019: 173).

Perdebatan didasari beberapa faktor, pertama, masih sedikitnya jumlah penduduk dan persebaran penduduk di Lampung, kebanyakan masyarakat bermukim di tepian sungai besar atau pesisir, sedangkan bagian dalam masih berbentuk hutan belantara. Kedua, penggunaan transportasi air dianggap lebih menguntungkan karena keberadaannya di beberapa sungai dan cabang. Ketiga, berkaitan dengan gencarnya pembangunan jaringan jalan raya bagi transportasi darat. Atas pertimbangan inilah, pembangunan kereta api dianggap masih belum diperlukan (Kristian, 2019: 174).

Ketiga, dibangunnya persawahan. Upaya mengembangkan perekonomian desa transmigrasi, khususnya Bagelen Lampung, maka dibangun persawahan untuk para pendatang tahun 1910 dengan jumlah sawah basah 460 bau, sewa semi basah 270 bau, tegal 235 bau. Perkembangan terus dilakukan dengan perluasan sawah menjadi 700 bau, sawah semi basah 400 bau, dan tegalan 465 bau pada tahun 1916. Luas tanah persawahan belum bisa menjadi faktor pendorong para transmigran memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih ada penduduk yang tidak memanfaatkan lahan pertaniannya, karena pada kenyataannya pada waktu penyerahan lahan, belum sepenuhnya berupa sawah atau tegalan, tetapi masih banyak pohon-pohon bertembangan dan masih banyak ilalang. Penduduk masih meyakini, bahwa lahan masih perlu dibenahi agar benar-benar dapat ditanami (Yuliyani, dkk, 2022: 10).

Keempat, pembangunan irigasi. Pembangunan irigasi dilakukan di beberapa daerah, yang paling mencolok adalah Metro dan Pringsewu. Daerah Pringsewu merupakan perluasan perkampungan transmigran Jawa yang dibuka pada tahun 1925 (Karsiwan & Pujiati, 2018: 71). Sedangkan Metro merupakan daerah perluasan yang dibuka pada tahun 1935 (Amir & Rahman, 2020: 19).

Jaringan irigasi di daerah transmigran Pringsewu adalah jaringan yang berhasil dibangun pertama kali oleh pemerintah. Proyek transmigrasi yang telah terbukti keberhasilannya dijadikan patokan dalam semua proyek kolonisasi yang disponsori pemerintah (Hardjono, 1982: 43). Pembangunan irigasi dinilai sangat penting karena berhubungan dengan pertanian.

Pembangunan jaringan irigasi melibatkan warga Pringsewu secara bergotong royong. Pengerjaannya diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam *Staatsbald* tentang sistem kerja rodi (*herendiesten*) tahun 1919 No. 407, *Staatsbald* tahun 1931 No. 438). Pengerjaan sarana dan prasarana mengatur proyek pemerintah agar

warga tidak bekerja selama empat hari berturut-turut dalam seminggu. Peraturan ini dibuat agar transmigran memiliki waktu untuk mengerjakan lahan pertanian mereka (Karsiwan & Pujiati, 2018: 71).

Belanda pada masa politik etis di Pringsewu berhasil membangun lima buah talang dan tersebar di beberapa lokasi dan diberi nama sesuai dengan tempat talang air berada seperti talang Ganjaran di Kecamatan Ganjaran, talang Fajaresuk satu, dua di daerah Fajaresuk, talang Bumiarm di Desa Bumiarm dan juga talang Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu. Talang ini berfungsi sebagai penghubung saluran irigasi yang dibangun melintasi perbukitan dan berfungsi untuk mengairi area sawah. Talang irigasi berjumlah lima buah dengan panjang bervariasi mulai 50 meter sampai yang terpanjang 200 meter dengan lebar mencapai dua meter (Karsiwan & Pujiati, 2018: 71).

6. KESIMPULAN

Pelaksanaan program transmigrasi atau dikenal dengan istilah kolonisasi pada masa kolonial Hindia Belanda, disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang menjadi latar belakang utama pelaksanaan kolonisasi, karena adanya tuntutan politik etis. Kebijakan politik etis mengedepankan trias politik, yaitu imigrasi, irigasi dan edukasi. Program perpindahan penduduk Jawa Tengah ke Lampung merupakan rangkaian dalam kebijakan imigrasi. Kebijakan pemerintah Belanda yang bersifat desentralisasi termasuk menjadi alasan diharuskannya pelaksanaan program perpindahan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Jawa selalu bertambah drastis. Minimnya lahan dan kualitas tanah yang terus turun di Jawa, menyebabkan kawasan permukiman maupun industri sulit untuk dikembangkan. Mempertimpangkan laju pertumbuhan yang cepat dan kondisi geografis yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Hindia Belanda menyusun rencan pelaksanaan program transmigrasi pada tahun 1904. Pelaksanaan program transmigrasi berhasil dijalankan pada tahun 1905 ke Desa Bagelen, Gedong Tataan, Lampung.

Pelaksanaan program transmigrasi sudah melalui proses perencanaan. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan politik etis dianggap sebagai manifestasi, khususnya di bidang imigrasi. Program transmigrasi dianggap sebagai upaya preventif dalam menangani bencana kelaparan di Jawa. Proses transmigrasi pada masa Hindia Belanda melewati empat fase; pertama pada periode percobaan 1905 – 1911, periode kedua 1912 – 1931, periode ketiga 1932 – 1941. Pelaksanaan pada setiap masa memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing.

Pelaksanaan program transmigrasi membawa dinamika masyarakat Jawa pendatang dan penduduk asli Lampung. Terjadinya pertemuan dua kelompok dapat memberikan pengaruh pada bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dinamika sosial yang dapat terlihat dalam perkembangan etnis Jawa yang pesat. Hubungan masyarakat Lampung dan Jawa yang tadinya hanya sekedar pekerjaan, setelah melalui proses interaksi sosial menjadi hubungan yang tidak hanya sebatas rekan kerja, melainkan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Dinamika budaya dalam masyarakat yang nampak, ada pada kebebasan masyarakat Jawa yang dapat mengembangkan kebudayaannya dengan leluasa, tidak ada penolakan di dalamnya. Hal itu dikarenakan falsafah dan prinsip yang dipegang oleh penduduk asli Lampung. Sifat terbukanya orang Lampung pada masyarakat asing berasal dari Piiil Pesenggiri dan Sang Bumi Ruwa Jurai. Adanya penduduk Jawa membawa dinamika ekonomi yang tidak pasti. Pernah penduduk Jawa menyebabkan Bank Lampung bangkrut dikarenakan peminjaman yang tidak dikembalikan dan tidak dimanfaatkannya penggunaan uang untuk keperluan pertanian. Di sisi lain, penduduk Jawa mampu menggarap lahan dengan baik, membangun sistem irigasi, pertanian dan mampu membantu pembangunan jalur transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir dan Rahman. (2020). Wonomulyo: Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1937-1952. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 13 – 30.
- Ariwibowo, G. A. (2018). Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan di Karesidenan Lampung pada Periode 1856 Hingga 1930. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 10(2), 5-6.

- Asri, F. H. (2022). POLA KOLONISASI PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI LAMPUNG DAN MAPILI (1905–1942). *Jurnal CANDI*, 22(1), 119-135.
- Dahlan, M. Halwi. (2014). Perpindahan penduduk dalam tiga masa: kolonisasi, kokuminggakari, dan transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(3), 335-348.
- Hardjono. (1982). *Transmigrasi dari kolonisasi Sampai Swakarsa*. Gramedia: Jakarta.
- Hardjosudarmo, S. (1965). *Kebidjaksanaan Transmigrasi dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Bharatara: Jakarta
- Heeren, H. J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Obor: Jakarta.
- Horvath, R. J. (1972). A definition of colonialism. *Current anthropology*, 13(1), 45-57.
- Junaidi, J., Suwarno, S., & Romando, F. S. (2021, December). Transformation of Transmigration Areas as Ethnic Political Identity (A Study of Javanese Ethnicity in Pringsewu Regency, Lampung Province). In 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (pp. 135-142). Atlantis Press.
- Karimah, Dewi. (2018). Kebijakan Djawatan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Purworejo Tahun 1953-1958. *Ilmu Sejarah-S1*, 3(3). Diakses dari:
- Karsiwan, K., & Pujiati, P. (2018). Jejak-jejak politik etis pemerintah kolonial Belanda sebagai alternatif sumber belajar IPS di sekolah. *Jurnal Tekstual*, 16(31), 42-58.
- Kingston, J. (1990). Agricultural Involution among Lampung's Javanese?. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 27(4), 485-507.
- Kristian, Yuli. (2019). *Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada Tahun 1800 – 1942*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang. Budaya. Yogyakarta.
- Lafamane, F. (2020). *Antropolinguistik (Hubungan Budaya Dan Bahasa)*.
- Lomba. (2003). *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Bentang Budaya: Yogyakarta
- MacAndrews C. dan Rahardjo. (1983). *Pemukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di Indonesia*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nakhrowi, A. (2020). *Naskah Sumber Arsip Pringsewu Masa Kolonisasi*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu: Pringsewu
- Ruslan, M. (2016). Prediksi Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menggunakan Metode Semi Average. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 2(1).
- Sjamsu. M A. (1960). *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905 – 1955*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Sudarno. (2018). The Colonization Trial Policy In Gedong Tataan, Lampung In 1905-1917. *Paramita: Historical Studies Journal*, 28(1), 1-12.
- Sukarman, S., Nugroho, K., & Sulaeman, Y. (2013). Perkembangan dan permasalahan sistem klasifikasi tanah di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 7(2), 97 - 112
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403 - 416.
- Suwando. (2018). *Sejarah Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung: Lampung.
- Syafiie. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Tirtosudarmo, R. (2016). The Javanese in Lampung, Stranger or Locals? With the Reference of Chinese Experience. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 161-172.
- Tirtosudarmo. (1990). *Transmigration And Its Centre-Regional Context The Case Of Riau And South Kalimantan Provinces, Indonesia*. Thesis: Australian National University.

Yuliyani, R., Kurniawan, P. W., & Hendratama, O. (2022). Perkembangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Pada Tahun 1905-1945 Di Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 4(1), 1-12.